

Selama tahun 1980an, dalam rangka menanggapi kebutuhan dan guna melibatkan masyarakat pedesaan, The Ford Foundation mulai memberikan dukungan pada program-program yang berkenaan dengan pemajuan pengelolaan sumber daya lahan dan air berbasis komunitas, peningkatan produktivitas ekosistem-agraris dan pengembangan wirausaha mikro oleh perempuan. Salah satu ciri khusus dari periode tersebut adalah dukungan bagi organisasi-organisasi masyarakat sipil yang beroperasi diluar kerangka Pemerintah untuk memperjuangkan keprihatinan berkenaan dengan hukum dan HAM, lingkungan hidup, kepentingan konsumen dan kesetaraan gender. Penting pula dicatat bahwa pada masa ini dukungan akan kerja bagi pelestarian dan vitalitas budaya semakin mendalam, yakni usaha untuk mempelajari, mendokumentasikan, dan mempertahankan kelangsungan tradisi Indonesia yang beragam dan penuh daya hidup.

Pada era 1990an, semakin jelas terlihat kebangkitan oposisi dari berbagai sektor masyarakat walaupun masih terfragmentasi, dan juga bahwa kesenjangan ekonomi, korupsi oleh para pejabat negara, serta kurangnya keterbukaan menjadi permasalahan yang makin pelik. Semakin lama semakin banyak Penerima hibah The Ford Foundation yang menyuarakan keprihatinan akan keadilan sosial melalui pengakuan akan keberadaan kelompok budaya minoritas dan "hak mereka untuk berbeda", gerakan perempuan menuntut pemenuhan kesehatan reproduksi dan penghidupan yang lebih baik, warga masyarakat dan wartawan memajukan kebebasan berekspresi, serta tuntutan masyarakat adat akan pengakuan hak

memperkenalkan Duta Bebas Pengetahuan, Christian Sugiono. Wikimedia Indonesia tidak memiliki kontrol dan tidak memiliki Wikipedia bahasa Indonesia. Wikimedia Indonesia juga merupakan organisasi mitra lokal yang independen terhadap Wikimedia Foundation. Mitra-mitra lokal Wikimedia Foundation secara keseluruhan di dunia merupakan badan-badan independen yang didirikan (diantaranya) untuk mendukung dan mempromosikan proyek-proyek Wikimedia dalam cakupan geografi tertentu (negara). Seperti Wikimedia Foundation, mitra-mitra lokal memiliki misi untuk "memperkuat dan memberikan kemampuan agar masyarakat di seluruh dunia dapat mengumpulkan dan mengembangkan bahan pendidikan dengan lisensi bebas atau domain umum, dan menyebarkannya secara efektif dan menyeluruh".

Wikimedia Indonesia awalnya dicetuskan untuk didirikan pada pertemuan (kopi darat) sukarelawan penulis Wikipedia Bahasa Indonesia pada 22 November 2006 yang dihadiri oleh tujuh orang pengguna. Setelah melalui kurang lebih empat belas pertemuan, pada 2 Mei 2008 upaya ini dikukuhkan dengan penulisan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi. Pada awalnya bentuk organisasi adalah yayasan namun setelah berkonsultasi lalu ditentukan bahwa bentuk organisasi yang paling tepat adalah berupa perkumpulan dengan kekuasaan terbesar berada di tangan anggota. Wikimedia Indonesia didirikan oleh 19 orang yang kemudian dikenal sebagai "pendiri". Wikimedia Indonesia mengumpulkan dana dari ke-19 pendiri ini sebesar lima juta rupiah. Organisasi ini berdiri

tanpa dukungan dana dari luar dan murni inisiatif para pendirinya. Jabatan Direktur Eksekutif pertama (yang kemudian diubah dengan AD/ART revisi tahun 2011 menjadi Ketua Umum) adalah Ivan Lanin. Pada tahun 2013, posisi Ketua Umum Wikimedia Indonesia dijabat oleh Siska Doviana.

Pada tahun 2008, Wikimedia Indonesia resmi berdiri dan disahkan melalui akta notaris. Diakhir tahun 2010, revisi anggaran dasar dari pemerintah Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diadopsi oleh organisasi dan disahkan pada tahun 2011. Organisasi ini didirikan dengan tujuan membina pengetahuan pada umumnya, dan sumber terbuka pada khususnya. Keanggotaan perkumpulan berdasarkan kesukarelaan, kekeluargaan, dan kejujuran. Anggota diharapkan aktif memberi masukan dan berkontribusi pada organisasi berupa tenaga, pikiran, dan waktu. Wikimedia Indonesia adalah organisasi independen dan secara hukum tidak terkait dengan organisasi apapun juga. Walaupun berdiri sendiri, berdasarkan sejarahnya organisasi didirikan dengan misi pengetahuan bebas yang sama dengan asosiasi-asosiasi di belahan dunia lain dan secara internasional yang mendukung misi ini. Wikimedia Indonesia di tahun yang sama pendiriannya pada tahun 2008 diakui sebagai mitra lokal Wikimedia Foundation, Inc., sebuah yayasan nirlaba bebas pajak di Amerika Serikat, yang menaungi proyek-proyek kolaborasi wiki terbesar di dunia, termasuk Wikipedia, sebuah ensiklopedia daring yang bebas dan gratis. Wikimedia Indonesia mendukung tapi tidak

Visi

Pembentukan ekosistem internet dan pemerintahan di Indonesia yang menerapkan perlindungan dan pemenuhan hak atas informasi, hak untuk memiliki kebebasan ekspresi dan pemanfaatan teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) dan Internet strategis, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Indonesia.

Misi

“INTERNET SAFETY” Untuk mengembangkan kesadaran masyarakat Indonesia, penekanan pada anak-anak dan keluarga, pada penggunaan ICT dan latihan Internet dengan aman dan bijaksana.

“INTERNET RIGHT” Untuk memberdayakan masyarakat sipil Indonesia, khususnya informasi dan aktivis hak asasi manusia, dengan mendukung mereka untuk menggunakan TIK dan internet sebagai mereka adalah alat yang memungkinkan dalam memenuhi hak atas informasi.

“INTERNET GOVERNANCE” Untuk mendukung dialog multi pihak Indonesia di ICT dan Internet Governance sementara menjunjung tinggi prinsip-prinsip kunci dari transparansi, akuntabilitas, kesetaraan, kerjasama dan profesionalisme.

6. Profil Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) lahir sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rejim Orde Baru. Mulanya adalah pembredelan Detik, Editor dan Tempo, 21 Juni 1994. Ketiganya dibredel karena pemberitaannya yang tergolong kritis kepada penguasa.

4. Jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.
5. Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahui oleh masyarakat.
6. Jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto dan dokumen.
7. Jurnalis menghormati hak nara sumber untuk memberi informasi latar belakang, *off the records* dan embargo.
8. Jurnalis segera melarang setiap pemberitaan yang diketahui tidak akurat.
9. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana dibawah umur.
10. Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, cacat/sakit jasmani, cacat/sakit mental, atau latar belakang sosial lainnya.
11. Jurnalis menghormati privasi, kecuali hal itu bisa merugikan masyarakat.
12. Jurnalis tidak menyajikan berita dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik dan seksual.
13. Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.

untuk mempertanyakan persoalan ini kepada pihak manajemen redaksi.

- 2) Surat yang kami tujukan kepada manajemen redaksi, dijawab dengan pernyataan secara lisan oleh Dadi Sumaatmadja (Kepala Produksi berita saat itu), bahwasanya kami diminta untuk melakukan introspeksi diri kenapa tidak diangkat menjadi produser hingga sekarang. Pihak manajemen pun sekali lagi tidak dapat menunjukkan hasil penilaian yang terukur terhadap kinerja dan kemampuan kami.
- 3) Lebih kurang sebulan lamanya kami tidak mendapatkan jawaban dari manajemen redaksi soal draft penilaian untuk para produser/ asistenproduser ini.
- 4) Kami kemudian berupaya menemui Direktur utama (Dirut) Metro TV yang baru, Adrianto Machribie. Kami menyatakan bahwa ingin mengadakan pertemuan untuk membahas soal buruknya manajemen redaksi yang berakibat pada terhambatnya penjenjangan karir dan gaji karyawan ini. Dirut Metro TV kemudian mengundang semua produser dan asisten produser untuk bertemu. Pada pertemuan tersebut, semua produser/ asisten produser yang hadir menyatakan kekecewaannya pada manajemen redaksi yang kami nilai menjalankan manajemen dengan buruk (tidak ada penilaian yang terukur, kebijakan yang subjektif hingga macetnya

komunikasi diantara kami). Dirut Metro TV berjanji akan memperbaiki manajemen redaksi dan membentuk tim untuk memperbaikinya.

5) Dari berbagai kasus ini, maka saya dan beberapa teman kemudian membentuk organisasi karyawan untuk menyelesaikan beberapa persoalan di redaksi Metro TV, karena masalah ini tak hanya menimpa asisten produser dan produser, namun juga menimpa teman-teman kami yang lain yang punya persoalan dengan gaji, jenjang karir dan status mereka. Organisasi karyawan yang kami bentuk ini sebagai wujud keprihatinan kami terhadap buruknya manajemen redaksi Metro. Kami berharap dengan adanya organisasi ini, kedepannya bisa menjembatani komunikasi yang sehat antara manajemen dan karyawan seperti halnya yang ada dalam organisasi serikat pekerja.

6) Pada 22 Desember 2011, Dadi Sumaatmadja meminta saya untuk pindah ke program acara Metro Malam. Di saat yang sama, saya juga memberikan evaluasi pada program Metro Malam yang banyak melakukan pelanggaran HAM dan tidak sensitif gender, misal: menayangkan wajah tersangka secara terbuka, menayangkan wajah Pekerja Seks Komersial (PSK) yang sedang dikejar-kejar petugas keamanan secara terbuka dan menayangkan tayangan-tayangan kekerasan secara vulgar.

Saya ungkapkan bahwa tayangan seperti ini melanggar Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran serta melanggar Kode Etik Jurnalistik. Namun justru manager HRD menyatakan bahwa oleh manajemen redaksi, saya dinilai membangkang dan terlalu banyak mengkritik. Padahal kritikan ini didasari untuk perbaikan program siaran agar punya perspektif yang baik yang akan disajikan kepada pemirsa Metro TV.

- 7) Perlakukan manajemen redaksi yang subjektif dan tidak juga memberikan solusi ini akhirnya membuat puluhan produser dan asisten produser kecewa. Kurang lebih 30 orang produser dan asisten produser Metro TV kemudian memutuskan untuk keluar. Mereka sudah tidak tahan atas perlakuan dan penilaian secara subyektif dari manajemen redaksi Metro TV.
- 8) Pada Tanggal 26 Desember 2011, saya mulai bertugas diprogram siaran Metro Malam. Sementara beberapa pembenahan kemudian mulai dilakukan oleh Direktur Utama Metro TV, Adrianto Machribie, mulai dari pembenahan kedudukan/ organisasional manajemen redaksi, pemberian assesment pada semua karyawan hingga pembenahan ruangan di Metro TV yang kini lebih terbuka.

9) Pada Awal Januari 2012, manajemen redaksi memberikan kenaikan gaji kepada beberapa karyawan. Kenaikan gaji yang dilakukan hanya untuk beberapa asisten produser ini dilakukan secara tertutup dan dengan menggunakan surat khusus dari manajemen redaksi. Kami menyambut baik kenaikan gaji ini, namun amat kami sayangkan, kenaikan gaji ini tidak dilakukan secara transparan dan hanya terjadi pada beberapa orang saja. Sekali lagi, penilaian dilakukan atas dasar suka dan tidak suka. Hal ini terbukti ketika soal kenaikan gaji tersebut saya tanyakan pada pihak HRD Metro TV. Pihak HRD metro TV menyatakan bahwa memang ada surat khusus dari manajemen redaksi untuk menaikkan gaji pada beberapa orang asisten produser saja.

10) Selanjutnya, pada hari Jumat, 27 januari 2012 manajemen redaksi membagikan bonus dari perusahaan. Namun, pembagian bonus ini kami nilai diskriminatif. Hal ini dikarenakan, ada karyawan yang tidak mendapatkan bonus. Ada juga karyawan yang hanya mendapatkan bonus 0,25 kali gajinya, namun ada karyawan yang mendapatkan bonus hingga 5 kali gaji. Kami sangat menyayangkan hal ini. Disaat Direktur Utama Metro TV melakukan beberapa pembenahan, justru manajemen redaksi memberikan keputusan yang sangat subyektif dan selalu didasarkan dari rasa suka dan tidak suka.

11) Berangkat dari situasi yang tidak fair ini, saya dan beberapa teman kemudian mempertanyakan soal surat khusus kenaikan gaji beberapa orang asisten produser dan soal pemberian bonus ini kepada kepala produksi berita Dadi Sumaatmadja. Saya juga meminta diadakan pertemuan untuk menjelaskan penilaian bonus ini, karena hampir semua awak redaksi mempertanyakan soal ini. Namun Dadi menolak bertemu di pertemuan besar. Dadi Sumaatmadja hanya mau ditemui secara personal.

12) Kami bertiga (Edi Wahyudi dan Matheus Dwi Hartanto) dan beberapa teman lain selanjutnya juga mempertanyakan hal ini kepada Wayan Eka Putra (kepala produksi berita yg baru) soal pemberian surat khusus pada beberapa asisten produser dan penilaian pada pemberian bonus yang diskriminatif, namun kami tidak mendapatkan jawaban. Selanjutnya kami meminta untuk diadakan pertemuan dengan pihak manajemen HRD Metro TV dan Wayan Eka Putra pada hari Selasa, 31 Januari 2012.

13) Pada proses selanjutnya, saya dan beberapa teman membuat notulensi soal perkembangan dan rencana pertemuan dengan manajemen redaksi. Notulensi tersebut saya kirimkan kepada dua orang teman melalui sms. Namun sms ini disebarluaskan oleh beberapa teman kepada banyak karyawan di Metro TV.

kesalahan terhadap diri saya. Manajemen Metro TV ketika itu menyatakan akan mendiskusikan dan mengupayakan permintaan ini.

19) Pada tanggal 17 februari 2012 , saya bersama Winuranto, Aditya dan Kustiah (AJI Jakarta) kembali bertemu Avi Pranantha. Namun Avi Pranantha menyatakan bahwa: ia belum menemukan posisi bagi saya di bagian redaksi. Ia masih akan berusaha menanyakan kembali kepada manajemen redaksi Metro TV agar saya bisa kembali bekerja di bagian redaksi. Kemudian pada kesempatan tersebut saya juga menanyakan kembali tentang kesalahan yang saya lakukan sehingga saya kemudian di-nonjobkan. Avi Pranantha kembali menyatakan bahwa : saya tidak melakukan kesalahan, namun manajemen redaksi memang tidak mau menerima saya kembali dengan tanpa alasan.

20) Pada tanggal 24 Februari 2012, kami melakukan pertemuan terakhir. Saya, Winuranto dan Kustiah (AJI Jakarta) dan manajemen Metro TV. Namun Avi Pranantha kembali menyatakan bahwa pihak redaksi Metro TV tidak mau menerima saya kembali dengan tanpa alasan. Ketika saya kembali menanyakan apa kesalahan saya, pihak manajemen HRD kembali menyatakan bahwa dari sisi tugas jurnalistik

dibawa dulu ke Pengadilan Hubungan Industrial. Setelah ada keputusan dari PHI, baru eksekusi dilakukan, termasuk soal gaji.

Masalahnya, kata dia, kasus Luviana dengan Metro TV kini belum diputuskan secara hukum. Bahkan, belum diajukan ke PHI. *"Perusahaan seharusnya masih tetap menjalankan kewajiban membayar upahnya sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, Sholeh menyebutkan harusnya Metro TV, sebagai pihak yang ingin memutus hubungan kerjalah, yang membawa kasus ini ke PHI. "Kepentingan dia lebih besar," ujarnya.*

Bonaparte Situmorang adalah kuasa hukum Metro TV yang dalam perannya di dalam film dokumenter ini dialah paling keras memproteksi Metro TV yang telah menggunakan jasanya sebagai pengacara terkait kasus Luviana.

Pihaknya telah melakukan prosedur yang benar terkait PHK terhadap Luviana, mulai dari mengajukan Luviana mundur, kemudian dipindahtugaskan, lalu di-nonjob-kan hingga akhirnya di-PHK. Dia mengatakan, pihaknya melakukan PHK kepada Luviana berdasarkan anjuran dari Disnaker Jakarta Barat melalui perundingan tripartit. *"Ada aturan main, dan kami sudah melakukan itu. dan itu juga merupakan anjuran dari Disnaker, dan manajemen tidak pernah menyalahkan Luviana untuk mendirikan serikat pekerja dan terkait gaji, jika semua*

karyawan melakukan hal itu setiap orang di-PHK di Gaji, bangkrut dong Metro TV?" tanya dia.

Namun bertentangan dengan Bonaparte, Maruli, pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) sekaligus salah satu pendamping Luviana, membantah klaim pihak Metro TV *"Jika Metro TV hingga saat ini belum membayarkan gaji kepada Luviana sejak di PHK 27 Juni lalu, merupakan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh manajemen Metro dan ini merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam pasal 93 ayat 2 huruf F juncto Pasal 186 UU no 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP no. 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah dengan ancaman pidana 4 tahun dan denda 400 juta,"* papar Maruli.

Winuranto Adi adalah Ketua Divisi Serikat Pekerja Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dalam film dokumenter di balik frekuensi, dalam beberapa komentarnya didalam film, Winuranto menegaskan pembelaan keras terhadap kasus yang menimpa luviana , dalam komentarnya mengatakan Winuranto *"Kasus Luviana harus diselesaikan dan kami akan keliling ke instansi-instansi pemerintahan yang memiliki kompetensi terkait penyelesaian kasus ini. Kami akan adukan ke Komisi IX DPR RI yang menangani masalah ketenagakerjaan, ke Komisi III yang menangani masalah hukum, juga melaporkan kasus ini kepada Kementrian Tenagakerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), serta akan mendatangi tokoh msayarakat yang memiliki kearifan terkait masalah ini*

Wiwin--sapaan akrab Winuranto Adhi-- mengatakan bahwa Aliansi Metro juga sudah siap membawa kasus yang dialami Luviana ke ranah hukum dengan berencana menggugat pihak management Stasiun Televisi Metro TV, atas tindakan yang kesewenang-wenangan yang dilakukan kepada Luviana. Menurut mereka, kesewenang-wenangan yang dilakukan kepada Luviana adalah sebuah tindakan yang ilegal yakni melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan dan sebuah perbuatan yang melanggar HAM.

Surya Paloh lahir di Kutaraja, Banda Aceh, 16 Juli 1951; umur 63 tahun, adalah pengusaha pers dan pimpinan Media Group yang memiliki harian Media Indonesia, Lampung Post, dan stasiun televisi Metro TV. Ia sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh aktif dalam politik dan dia adalah mantan Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar periode 2004 – 2009 Ia juga pendiri ormas Nasional Demokrat, yang kemudian dianggap sebagai penerus Partai Nasdem (Partai Nasional Demokrat). Lahir dari pasangan Daud Paloh dan Nursiah Paloh sebagai pemilik media Metro TV, yang tidak lain juga menjabat sebagai ketua umum partai NASDEM (*Nasional Demokrat*).

Surya Paloh mempunyai peran final dalam adegan klimaks dimana saat aksi demi aksi pembelaan terhadap Luviana tidak membuahkan hasil, Luviana harus “*face to face*” dengan seorang Surya Paloh di sekretariat NASDEM. Ini seolah menjadi scene klimaks dari rangkaian cerita di film tersebut. Disini kesadaran pengaruh media yang dapat memberikan efek

psikologis kepada orang yang berada didepan lensa. Juga yang menarik adalah pelarangan dokumentasi pertemuan Luviana dengan Metro TV dan penyusunan cerita yang dramatis.

Dalam scene ini, juga ditampilkan bagaimana seorang Surya Paloh yang begitu arogan dan mendominasi forum. Hingga kemudian, dibantah oleh seorang anggota LBH dari Luviana, kemudian dilanjutkan oleh tangisan Luviana dan ditutup dengan janji manis dari Surya Paloh. Sangat disayangkan, kenapa Luviana harus menangis dalam scene ini. Mungkin ini sebagai bentuk keprihatinan kepada Metro TV yang mematikan harapan seorang Luviana. Mematikan mimpi seorang ibu, mematikan kejujuran dan keadilan, serta penghinaan terhadap hak-hak pekerja.

Aburizal Bakrie atau .Ir. H. Aburizal Bakrie, yang juga akrab dipanggil Bakrie, Ical, atau ARB (lahir di Jakarta, 15 November 1946; umur 68 tahun), adalah pengusaha Indonesia yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar sejak 9 Oktober 2009. Ia pernah menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dalam kabinetyang sama, namun posisinya berubah dalam perombakan yang dilakukan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 Desember 2005.

Sebagai pemilik Bakrie Group yang di dalamnya ada dua komponen besar pembangun masyarakat dalam struktur ekonomi yakni PT. Minarak

masyarakat dengan suka cita. Mereka kemudian mengarak Suwandi menuju Gedung Wanita Kota Tegal, untuk beristirahat. Suwandi tiba di Kudus mendapat sambutan meriah dari tokoh masyarakat dan elemen-elemen masyarakat di wilayah kota Kudus.

10) **29 Juni 2012** Kedatangan Suwandi di Brebes disambut Aktivistis Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak). Aktivistis Gebrak juga melakukan aksi teatral. Setelah itu mereka berjalan kaki menuju alun-alun Brebes dan melakukan orasi sesaat menuntut agar pemerintah menemukan solusi tepat atas semburan lumpur Lapindo. Usai berorasi mereka melanjutkan perjalanannya ke Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Anwar Desa Pakijangan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Ponpes tersebut, Suwandi dan sejumlah LSM disambut Kyai Haji Miftakh, pengasuh Ponpes Al-Anwar. Kyai Haji Miftakh lalu memberikan doa agar tujuan Suwandi sukses dan selamat sampai tujuan.

11) **30 Juni 2012** Saat memasuki Cirebon, Suwandi disambut antusias warga. Warga bahkan memberi bantuan berupa uang, makanan, maupun minuman.

12) **4 Juli 2012** Tiba di Subang, Suwandi mendapat sambutan hangat warga dan memberi tempat bermalam di sebuah gereja.

- 13) **5 Juli 2012** Suwandi tiba di Karawang pada malam hari. Keesokan harinya, dia disambut perwakilan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Serikat Petani Karawang (Spetak). Disana, dia bersama aktivis berorasi didepan sebuah pusat perbelanjaan dan didepan kantor Pemkab Karawang.
- 14) **8 Juli 2012** Suwandi akhirnya tiba di Jakarta setelah 25 hari perjalanan dari Porong, Jawa Timur. Kedatangannya di Jakarta tanpa sandal jepit sebab sandalnya sudah putus di Bekasi. Suwandi yang mengenakan celana pendek dan membawa tongkat serta ransel ini tiba di kantor Kontras, Jl Borobudur, Jakarta Pusat, pukul 14.00. Kedatangannya disambut karpet merah. Selama dia jalan kaki, Suwandi mengaku sudah menghabiskan 8 sandal jepit.
- 15) **17 Juli 2012** Setelah istirahat beberapa lama, Suwandi mendatangi gedung Wisma Bakrie II, di Kuningan, Jakarta, milik Ical. Di depan gedung itu, dia menggelar aksi menuntut penyelesaian hak-hak warga Sidoarjo yang menjadi korban lumpur Lapindo.
- 16) **25 Juli 2012** Suwandi meminta maaf kepada keluarga besar Bakrie lewat acara talkshow TvOne yang disiarkan langsung. Suwandi yang kini menyebut lumpur Sidoarjo dan bukan lumpur Lapindo, menyatakan keluarga Bakrie mampu

menyelesaikan masalah tersebut. Dia aksi jalan kaki karena terprovokasi.

Harto Wiyono adalah korban lumpur yang mendampingi dan juga mendokumentasi perjalanan Hari Suwandi ke Jakarta yang pada akhirnya dipolitisasi oleh Bakrie dan dimanfaatkan oleh TV One. Setelah meminta maaf kepada keluarga Bakrie secara live di TV One, justru menghilang dan tidak tahu keberadaannya. Harto Wiyono, teman yang selalu mendampingi Hadi Suwandi seketika tidak mengetahui dan sangat kecewa karena merasa dibohongi.

Paring Waluyo sejak lumpur menyembur 2006, Paring sudah melakukan pendampingan terhadap korban lumpur. Dari aktivitasnya itulah Paring dekat dengan Suwandi. Paring juga termasuk orang yang terkejut dengan aksi minta maaf Suwandi di Tv One, televisi milik Bakrie. Dalam Film Dokumenter *Di Balik Frekuensi* di selipkan juga iklan Tv One, ditayangkan bagaimana Suwandi memulai aksi jalan kakinya dari Porong, Sidoarjo. Aksi-aksi Suwandi di beberapa kota juga ditampilkan, lengkap dengan kritik kerasnya kepada keluarga Bakrie. Namun di tengah-tengah iklan, juga ditayangkan kembali pernyataan permintaan maaf Suwandi yang dilakukan dalam sebuah acara wawancara di televisi milik Bakrie tersebut. "Ketika emosi mengalahkan logika," demikian salah satu narasi dalam iklan tersebut. Diakhir iklan, juga ditampilkan sosok Ical yang dikemas dalam citra penuh wibawa dan sahaja. Ditayangkan pula tanggapan Ical atas

permintaan maaf Suwandi kepada dirinya."Inilah hikmah Ramadan," kata Bakrie.

Hary Tanoë Soedibjo dalam Film Di balik Feekuensi ditampilkan dengan MNC Group yang tidak lain adalah salah satu perusahaan media yang di mulikinya. Hary Tanoesoedibjo yang sempat tersandung kasus korupsi juga membawa polemik tersendiri. Berbagai media menayangkan pemberitaan mengenai kasus korupsi ini. Namun lagi-lagi ada perbedaan dalam penayangan pemberitaannya. Apabila media lain mengungkapkan Hary Tanoesoedibjo dan korupsi yang dilakukannya, maka tidak dengan RCTI. Media massa RCTI ini lebih mengungkapkan kebaikan Hary Tanoesoedibjo dalam menjalani kasus ini. sebut saja dalam satu pemberitaan di RCTI yang mengatakan bahwa 'Hary Tanoesoedibjo berinisiatif sendiri mendatangi KPK', dari pemberitaan ini jelas ingin menunjukkan bahwa Hary Tanoesoedibjo adalah orang yang bertanggung jawab dan memiliki etiket yang baik. Sekarang pertanyaannya, lantas masyarakat harus memandang pemberitaan dari sudut yang mana? Kalau saja setiap media menampilkan pemberitaan dengan perspektif pemilikinya.

Ezki Tri Rezeki Widianti Sebagai salah satu anggota KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), dalam film ini Ezki juga menyatakan, bahwa iklan politik di RCTI oleh Partai Nasdem sebanyak 127 iklan, MNC TV 112 iklan, Global TV 111 dan Metro TV 43. Untuk Partai Golkar, di TV One sebanyak 34. Dari data di atas, bisa dibayangkan, bagaimana kondisi

tahun 2013 ini. Maka, tak heran jika banyak kalangan menyebutnya sebagai “tahun politik”. Kalau terlibat dalam pelaporan tidak masalah, akan tetapi jika pemilik media tersebut adalah politisi, dan sekaligus ikut “bermain” dalam segala aktivitas pers lewat media mereka sangatlah berbahaya. Inilah kondisi ironis dunia media. *“Pemilik media itu-itu saja,* ujar Ezki Tri Rezeki Widiyanti dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang muncul di film ini. *“Kalau di KPI kami mengatakan hanya lima orang yang memiliki media di Indonesia dari segitu banyak televisi. Sebenarnya menurut Undang-Undang Penyiaran itu melanggar ya.”*

Ignatius Haryanto dalam film ini hanya berperan memberikan sedikit komentar mengenai perilaku pemilik media di Indonesia. Selaku Direktur Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) Ignatius juga sebagai pengamat media berpeson dalam film ini agar masyarakat dapat lebih cerdas dan kritis dalam mengamati berbagai perkembangan media massa tanah air. Disatu sisi film ini, dapat diisukan bermacam-macam oleh sebagian pihak, tapi dengan film ini, masyarakat diharapkan dapat lebih cerdas dan kritis terhadap perkembangan media massa. Termasuk penggunaan frekuensi siaran televisi yang bisa saja diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Yanuar Nugroho (peneliti senior bidang inovasi dan perubahan sosial Universitas Manchester) dalam film ditampilkan pada scene singkat menyatakan, “Media saat sekarang menjadi kanal kekuasaan.” Penonton akhirnya akan sadar, bahwa realita dalam televisi sekarang buta, Ucu

dalam filmnya, seolah ingin menyampaikan bahwa media dengan kepentingan pemiliknya sekarang, bertransformasi kembali menjadi *'masa orde baru yang malu-malu.'* Kembali pada masa otokritik, penguasaan atas pengaruh publik dalam ruang-ruang publik. Menurut Yanuar, ia tidak bisa membayangkan pada Pemilu 2014 nanti, dimana media-media yang seharusnya bisa lebih objektif, tetapi dianggap menjadi subjektif, karena media-media dikuasai oleh para politikus.

Umar Idris sebagai Ketua AJI Jakarta dalam film ini adalah orang yang paling getol membela Luviana untuk mendapatkan kembali hak – haknya sebagai buruh yang seharusnya mendapatkan upah . Dalam film ini Umar Idris mengatakan jika ditinjau dari sisi perundang-undang dan hukum yang juga didukung keputusan rekomendasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan, Metro Tv jelas-jelas telah melakukan pelanggaran UU Ketenagakerjaan dan pelanggaran HAM. "Pelanggaran pertama, Metro Tv membebaskan tugas Luviana tanpa keterangan. Kedua Metro Tv mem-PHK Luviana juga tanpa keterangan, dan Metro Tv tidak membayar upah Luviana sejak Juli 2012, padahal belum ada keputusan inkraht terkait status kepekerjaan Luviana," kata Umar Idris di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/1/2013). Seperti diketahui pada tanggal 5 Juni 2012 lalu, Surya Paloh selaku pemilik Metro Tv dalam pertemuan dengan Luviana bersama tim litigasi dan nonlitigasi Aliansi Metro di kantor Partai Nasdem berjanji akan mempekerjakan Luviana kembali di Metro Tv dengan posisi yang sama, yakni Asisten Produser. Namun, janji

di Indonesia yang meliputi media berbasis frekuensi seperti radio dan televisi, lalu media cetak dan portal media online yang jumlahnya terdapat 1248 dari stasiun radio, 1706 dari media cetak, 76 stasiun televisi dan 176 stasiun televisi yang sedang mengajukan izin siaran.

Obyek meliputi pemilihan data audio dan visual berikut yang tertera dalam tabel diatas adalah seluruh pemilik usaha media massa inti yang berjumlah dua belas orang yang memamah biak frekuensi publik dengan media miliknya. Pertama di mulai dari Visual Mahaka Media Group yang di pimpin oleh Erick Thohir, kedua Elang Mahkota Teknologi Group yang di miliki keluarga Eddy Kusnadi Sariadmadja, ketiga Visual Kompas Gramedia yang di miliki Group Jacob Oetama, keempat MNC Group oleh Hary Tanoesoedibjo, kelima Jawa Pos Group oleh Dahlan Iskan, keenam CT CORP oleh Chairul Tanjung, ketujuh Lippo Group James Riyadi, kedelapan MRA Media Group oleh Soetikno Soedarjo, kesembilan Media Group oleh Surya Paloh, kesepuluh Visi Media Asia oleh Aburizal Bakrie, kesebelas Femina Group oleh Pia Alisjahbana, dan yang ke dua belas adalah PT Tempo Inti Media oleh Yayasan Tempo.

Makna atau *interpretant* dapat dilihat dari gambar penyebaran frekuensi media massa berdasarkan media inti yang membentuk lingkaran kuasa yang menyajikan beraneka ragam jenis media sehingga membentuk persepsi kebebasan dalam memilih media, padahal kalau mau jeli dalam mencerna berita yang terima, variasi bahasa dalam media massa mempunyai

